

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka

1. Pangan dan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia yang harus dipenuhi setiap harinya. Pengertian pangan menurut Undang-undang No 7 tahun 1996 yaitu semua yang bersumber dari alam baik yang sudah diolah maupun tidak, digunakan untuk konsumsi (minum dan makan) baik berupa bahan baku, bahan tambahan dan sebagainya. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka pembangunan nasional, karena status pemenuhan kebutuhan pangan dapat dijadikan tolok ukur kesejahteraan masyarakat (Hanafie 2010). Krisis pangan yang terjadi pada suatu negara akan memberikan dampak pada stabilitas ekonomi (inflasi), sosial dan politik, oleh karena itu masalah berkaitan dengan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting.

Ketahanan pangan atau Food Security dikenal pada tahun 1970 an, pada masa itu ketahanan pangan hanya terfokus pada persediaan bahan pangan yang diproduksi sendiri dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 1980an konsep ketahanan pangan diperluas sampai bagaimana akses pangan per rumah tangga. Pada tahun 1990 konsep ketahanan pangan menjadi jumlah produksi pangan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan (Ariani 2002).

Pengertian Ketahanan Pangan menurut Undang undang yang tertuang dalam UU no 7 tahun 1996 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang dapat dilihat dari ketersediaannya cukup

baik jumlah ataupun mutu, mudah didapatkan oleh masyarakat, harga terjangkau. Sementara itu. Menurut organisasi pangan di PBB atau dikenal dengan *Food Availability Organization* (FAO) lebih menekankan pada tercukupinya kebutuhan pangan di masyarakat yang bergizi dan bermutu.

Ketahanan pangan meliputi bagaimana ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pangan harus tersedia dalam kondisi apapun (stabilitas) serta akses pangan yaitu kemampuan masyarakat untuk memproduksi ataupun membeli pangan yang dibutuhkan (Hanafie 2010).

2. Rawan Pangan

Rawan pangan merupakan kondisi dimana masyarakat di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut (Rustanti 2016) rawan pangan berhubungan dengan stabilitas (waktu) yang terbagi menjadi 2 yaitu kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*) dan kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Kerawanan pangan kronis adalah suatu keadaan dimana wilayah tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk jangka waktu yang lama karena berbagai faktor seperti ketersediaan yang kurang, akses terhadap pangan yang kurang, serta pemanfaatan gizi dari bahan pangan yang kurang optimal. Sedangkan kerawanan pangan kronis adalah suatu keadaan dimana suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam jangka waktu pendek atau sementara, biasanya karena faktor yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam atau konflik.

Menurut Sumarsono dkk (2017) Tingkat kerawanan bisa ditinjau dari (1) sisi produksi pangan yaitu kemampuan untuk menghasilkan bahan pangan untuk

memenuhi kebutuhan. (2) Proses distribusi tidak sesuai nya permintaan dan supply yang ada sehingga pangan menjadi langka (3) Konsumsi , dari aspek ini misal nya masyarakat tidak mampu membeli daya beli kurang atau karena kemiskinan.

3. Indikator Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi ketahanan pangan tergantung pada kondisi wilayah. Masalah ketahanan pangan merupakan permasalahan yang cukup kompleks sehingga perlu beberapa indikator untuk menganalisisnya. Dalam menganalisis tingkat ketahanan pangan sebaiknya tidak menggunakan indikator yang berhubungan dengan aspek ekonomi saja namun termasuk perilaku sehari-hari ataupun kebudayaan dalam pola konsumsi (Ariani, 2002). Ketahanan pangan memiliki beberapa sub sistem, diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta status gizi yang menjadi hasil dari ketahanan pangan tersebut (Rustanti, 2016), semua subsistem tersebut harus dipenuhi, karena jika salah satu aspek tersebut tidak dipenuhi maka belum bisa dikatakan tahan terhadap pangan. Sistem ketahanan pangan di Indonesia pada dasarnya meliputi (1) jumlah dan jenis ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat. (2) Pemerataan distribusi pangan bagi semua masyarakat (3) konsumsi pangan dengan nilai gizi seimbang, sehingga (4) status gizi masyarakat terpenuhi (Rustanti , 2016 p. 108).

Berdasarkan Panduan Penyusunan Peta Kerawan Pangan yang dikeluarkan oleh Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa penyusunan peta kerawanan pangan memakai dua indikator yaitu kerawanan pangan tansien yang terdiri dari

aspek ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan dan akses pangan. Kerawanan pangan kronis adalah kerawanan pangan yang terjadi karena bencana dan keadaan alam lainnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya :

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek Ketersediaan pangan (*food availability*) adalah jumlah produksi bahan pangan sereal yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi seperti beras, jagung, ubi, gandum, ketela. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan bahwa jumlah pangan yang dibutuhkan cukup bagi masyarakat baik berupa bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan ternak dll (Sumarsono dkk, 2017). Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dalam jumlah yang cukup, aman dikonsumsi, bergizi serta mampu mencukupi kebutuhan kalori tiap individu (Rustanti,2016).

Ketersediaan pangan dan produksi pangan memiliki makna yang berbeda, ketersediaan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pangan yang diperoleh dari luar produksi sendiri, sedangkan produksi pangan merupakan hasil dari tanah sendiri (Sumarsono, dkk 2017). Menurut FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Menghitung ketersediaan pangan dilakukan dengan mengetahui rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih bahan pangan.

b. Aspek Akses Pangan

Ketersediaan pangan disuatu wilayah mungkin mencukupi baik dalam jumlah ataupun kualitasnya, namun tidak semua rumah tangga atau masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pangan tersebut. Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2009) Akses pangan tergantung pada daya beli masyarakat terhadap

pangan yang dapat dipengaruhi oleh bagaimana keadaan penghidupan rumah tangga atau masyarakat di suatu daerah. Penghidupan dapat dicerminkan dari seberapa besar pendapatan, aset yang dimiliki, modal baik berupa SDM maupun SDA dan segala sesuatu yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup berupa pangan, tempat tinggal, keperluan pendidikan, kesehatan dll.

Aspek akses pangan (*food acces*) menurut Rustanti (2016) merupakan kemampuan individu atau rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan pangannya baik dari produksi sendiri, membeli ataupun mendapat bantuan. Menurut Ariani dan Saliem (2002) menyatakan bahwa faktor yang menentukan tingkat ketahanan pangan tingkat nasional maupun daerah adalah jumlah produksi pangan, persediaan pangan, permintaan serta jual beli pangan. Sedangkan faktor yang menentukan ketahanan pangan di rumah tangga adalah akses terhadap pangan. Meskipun jumlah ketersediaan pangan mencukupi, namun belum tentu tingkat ketahanan pangannya baik karena belum tentu mempunyai akses yang baik terhadap pangan.

Aspek akses terhadap pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan daya beli terhadap bahan pangan. Menurut Rustanti (2016, p. 107) mengemukakan bahwa *food acces* terdiri dari 3 yaitu akses fisik yang berkaitan dengan sarana prasarana untuk proses distribusi. Aspek ekonomi yang berhubungan dengan penghasilan masyarakat, jumlah lapangan pekerjaan dan harga. Akses sosial yang berhubungan dengan kecenderungan dalam hal pangan.

Kemiskinan menjadi salah satu hal yang termasuk dalam akses terhadap ekonomi. Terdapat beberapa kriteria kemiskinan menurut Bappeda Bantul dan

BPS diantanya 1) 60 %-80 % pendapatan hanya bisa digunakan untuk konsumsi. 2) Luas bangunan rumah < 8 m² . 3) Dinding rumah terbuat dari bahan kualitas rendah. 4) Tidak memiliki fasilitas BAB yang baik. 5) Tidak mendapat akses listrik. 6) pendapatan < Rp. 600.00 per bulan 7) Tidak memiliki investasi atau barang yan bisa dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000. 8) Pendidikan kepala keluarga minimal SD atau tidak tamat sekolah.

Kemiskinan menyebabkan pendapatan masyarakat rendah, jika pendapatan masyarakat rendah maka daya beli rumah tangga atau masyarakat terhadap kebutuhan pokok terganggu. Kemiskinan juga menjadi akar dari semua masalah di masyarakat misal nya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dll.

Aspek akses pangan dilihat dari sumber penghidupan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Rumah tidak akses listrik dan rumah tidak layak huni bisa menjadi indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tersedia nya akses listrik di suatu daerah akan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat, listrik dapat berguna untuk menunjang kegiatan warga baik untuk keperluan usaha (membuka lapangan pekerjaan) atau aktivitas sehari-hari. Rumah layak huni juga menjadi indikasi bahwa suatu rumah tangga sejahtera. Kriteria rumah layak huni menurut Bappeda Bantul dapat dilihat dari keadaan atap, lantai dan dinding (Aladin) yang tidak permanen atau terbuat dari bahan dengan kualitas yang rendah. Rumah yang tidak layak huni memiliki atap yang tidak permanen seperti jerami, daun daunan dsb. Lantai rumah sebagian besar masih berupa tanah, sedangkan untuk dinding rumah terbuat dari bahan yang tidak permanen dan kondisinya sudah tidak layak. Tingkat jumlah rumah tidak layak huni juga

berkaitan dengan kemiskinan lokal yang terjadi karena wilayah tersebut sulit dijangkau dan tidak mendapat dampak dari program pemerintah untuk mendapatkan bantuan rumah.

Akses fisik adalah kemudahan proses distribusi pangan yang ada di suatu wilayah, Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2009) menyebutkan bahwa indikator yang dapat mencerminkan akses fisik diantaranya adalah akses penghubung roda 4 serta kondisi jalan. Rumah Tangga atau masyarakat yang tidak memiliki akses penghubung yang dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai disebut dengan kemiskinan tingkat lokal. Suatu wilayah dengan keadaan geografis yang sulit untuk dijangkau biasanya kurang mendapat dampak dari program pemerintah, sehingga akan memiliki akses yang buruk terhadap pangan

Menurut Asmara (2012) indikator pengangguran termasuk dalam aspek akses pangan karena jumlah pengangguran dalam suatu rumah tangga akan menjadi beban dalam suatu rumah tangga tersebut, karena tidak ada pendapatan yang dihasilkan. Selain itu indikator rumah terbuat bambu merupakan indikator pendukung dari aspek kemiskinan.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan (Penyerapan Pangan)

Pemanfaatan atau penyerapan pangan merupakan output dari keadaan ketahanan pangan di suatu daerah. Pemanfaatan atau penyerapan pangan berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan status gizi. Aspek pemanfaatan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan. Menurut Rustanti (2016) penyerapan pangan adalah konsumsi pangan untuk kehidupan yang lebih sehat. Penyerapan suatu pangan tergantung

pada tingkat pengetahuan, ketersediaan air, fasilitas kesehatan yang tersedia serta kesehatan balita.

Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2009) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penyerapan atau pemanfaatan di suatu daerah. Indikator tersebut Diantaranya jumlah balita underweight, harapan jumlah bayi lahir hidup, rumah tidak akses air bersih, perempuan buta huruf. Jumlah balita underweight adalah balita dengan berat badan kurang dari standar yang ditentukan. Jumlah perempuan buta huruf adalah mereka yang berusia >15 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis. Tingkat pendidikan wanita menjadi salah satu indikator pemanfaatan pangan, pendidikan seorang wanita yang menjadi ibu akan berpengaruh terhadap pola asuh anak dan status kesehatan (Gizi) keluarga. Rumah dengan akses bersih yaitu rumah tangga yang teraliri sumber air bersih baik dari perusahaan air negara, sumber mata air lokal ataupun dari sumur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses air bersih ini berhubungan dengan kebersihan, karena air digunakan untuk mandi, minum, makan dan mengolah makanan, mencuci baju dll, sehingga jika air bersih tidak tersedia, maka penyerapan zat gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat akan terganggu.

Kerentanan Pangan Transien adalah tingkat kondisi ketahanan pangan yang ditentukan oleh resiko terkenan bencana atau hal lainnya yang berasal dari alam.

4. Kawasan Pesisir

Pesisir merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pantai, dengan batas 2 km ke arah darat yang dihitung dari garis pantai (Kodoatie & Syarief,

2010). Secara ekologis, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara lautan dan daratan, pada bagian darat nya masih terdampak fenomena yang terjadi di lautan seperti angin laut, gelombang sedangkan pada daerah laut biasanya sebagai tempat beraktivitas manusia. (Nugroho dan Dahuri,2004). Pengertian lain menyebutkan Pesisir (*coastal*) adalah wilayah yang meliputi sepanjang pantai sampai ke arah daratan yang sudah tidak terpengaruh terhadap aktivitas di laut (Heryoso, 1996).

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004) lahan di kawasan pesisir biasanya berpasir, lahan pasir salah satu jenis lahan marginal karena kurang subur karena adanya kekurangan, sehingga memiliki produktivitas yang rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khakim, dkk (2008) mengungkapkan bahwa keadaan tipologi di daerah pesisir Kabupaten Bantul sebagian besar adalah tipe pengendapan laut, sehingga mempunyai ciri dataran yang berombak, lahan nya berpasir dan terpapar angin laut. Lahan berpasir merupakan lahan marginal karena memiliki karakteristik berikut :

1. Unsur Hara nya rendah
2. 95 % berupa pasir sisanya tanah dan lainnya,
3. Struktur kurang baik
4. Karena sebagian pasir, maka tidak mampu mengikat air

Meski demikian bukan berarti lahan berpasir tidak dapat menghasilkan, dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman seperti cabai, bawang merah, umbi jika diolah dengan cara dan teknik yang benar (Nugroho dan Dahurri, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwantara (2013), wilayah bantul memiliki ciri-ciri lereng yang landai, berpasir, terdapat gumuk pasir akibat adanya kegiatan angin, serta terdapat alluvium yang dikeluarkan oleh gunung merapi. Hasil Penelitian Nurul Khakim (2008) yang dianalisis menggunakan analisis SWOT menyatakan bahwa berdasarkan tipe tipologi yang dimiliki pesisir Kabupaten Bantul, maka kegiatan yang sesuai adalah perikanan dengan model biocrete dan pertanian lahan pasir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2008) menyatakan bahwa sebagian masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Bantul menanam tanaman pangan, hortikultura dan memelihara sapi rata-rata setiap rumah tangga memiliki dua ekor sapi. Sedangkan untuk kegiatan bercocok tanam, petani lahan pasir di Kabupaten Bantul memiliki pola tanam dengan empat musim tanam. Musim tanam yang pertama dilakukan pada bulan November-Januari dengan menanam komoditas pangan seperti padi. Musim Tanam 2 dilakukan antara bulan Februari-Mei, tanaman hortikultura seperti bawang merah menjadi tanaman yang ditanam pada musim tanam kedua ini. Komoditas hortikultura lain seperti cabai ditanam pada musim tanam ketiga yaitu antara bulan Mei-Agustus. Musim tanam terakhir dilakukan penanaman dengan sistem tumpangsari bawang merah dan cabai pada bulan Agustus sampai November.

Keadaan sosial ekonomi di wilayah pesisir berbeda dengan keadaan sosial ekonomi rumah tangga bukan nelayan. Rumah tangga di wilayah pesisir masih bersifat tradisional, hal tersebut dapat dilihat dari (1) Pendidikan anggota keluarga yang relatif rendah. (2) Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah

relatif banyak. (3) kekayaan atau aset yang dimiliki rendah. Pendapatan keluarga di wilayah pesisir sangat tergantung pada kondisi alam. Pendapatan tidak menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu adanya upaya perubahan pola pikir dan pola perilaku seperti peningkatan SDM, peningkatan tingkat kesehatan, rumah yang layak dll. (Muslikhati, 2010)

Kawasan Pesisir di Kabupaten Bantul dengan luas sekitar 6.000 hektar terbentang dari barat ke timur meliputi kecamatan Sanden, Srandakan dan Kretek. Lahan pasir merupakan lahan marginal yang membutuhkan usaha konservasi agar mampu berfungsi baik sebagai pencegah erosi maupun berproduksi. Pemerintah DIY merencanakan pemanfaatan lahan pasir sepanjang pantai selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah tersebut dikembangkan menjadi agroisat pantai sehingga harus di dukung dengan sistem pertanian dan pengairan yang baik. (Dinas Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul, 2007). Guna mendukung program pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul merancang Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu (RSPPLT) yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tujuan utama dari rencana tersebut adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah dan menjaga kelestarian lingkungan (Bappeda Kabupaten Bantul).

Lahan pasir pantai rentan terkena abrasi pantai dan erosi pasir. Dampak dari erosi tersebut diantaranya 1) Lahan pantai memiliki tekstur kasar dan berporos sehingga rentan terkena erosi angin, 2) Hasil erosi adalah endapan pasir yang

dapat menutup lahan, 3) Butiran pasir yang terbawa angin akan menurunkan produktivitas tanaman dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, konservasi lahan pantai perlu dilakukan.

Konservasi lahan yang dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Bantul adalah dengan menanam tanaman penahan atau pemecah angin. Jenis tanaman yang biasanya ditanam di kawasan pesisir Bantul adalah pohon Cemara Udang. Penanaman pohon ini mampu mengurangi pengaruh tiupan angin yang membawa garam dan pasir yang mampu merusak tanaman pertanian. Selain itu, daun cemara udang digunakan sebagai pakan ternak.. Kegiatan untuk memperbaiki sifat fisik tanah lahan pantai dilakukan pemberian pupuk organik dan anorganik. Penambahan pupuk organik dan anorganik mampu membantu tanah untuk mengikat air serta melarutkan pupuk anorganik yang diberikan. Selain itu, dilakukan pembangunan sarana pengairan menggunakan sumur renteng dengan pompa air, adanya peternakan untuk mensuplai pupuk organik.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purwantoro, dkk (2014) yang berjudul Karakteristik Spasial Pengembangan Wilayah Pesisir DIY dalam Konteks UUK DIY Menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah pesisir Kabupaten Bantul adalah kegiatan pertanian, selain dari hasil pertanian masyarakat juga mendapat penghasilan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadinata, dkk (2009) menunjukkan bahwa 1) Kondisi ketahanan pangan berdasarkan pengeluaran pangan di pulau enggano adalah 41 % tahan pangan sedangkan sisanya berada

pada kondisi rawan pangan. Mayoritas masyarakat dengan kategori rawan pangan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. 2) Indikator yang mempengaruhi ketahanan pangan di pulau Enggano Bengkulu adalah pendidikan, pekerjaan, luas lahan yang dimiliki, pendidikan istri, jumlah anggota keluarga dan pengalaman bekerja.

Nurjanah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian potensi ketahanan pangan rumah tangga nelayan di wilayah pesisir di Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa masyarakat pesisir memiliki beberapa kendala dalam sistem ketahanan pangan, yaitu (1) Tingkat kesejahteraan nelayan dan petani masih rendah karena tingkat kemiskinan semakin tinggi. Meskipun kontribusi hasil perikanan yang sangat besar bagi negara namun tidak berdampak pada kehidupan nelayan atau petani di wilayah pesisir hal tersebut ditunjukkan dengan data bahwa 70 % masyarakat pesisir masih di garis kemiskinan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau nelayan tradisional. (2) Para petani dan nelayan tidak memiliki modal untuk kegiatannya sehingga produksinya tidak dapat meningkat. (3) Kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir tergantung pada keadaan alam dan terkendala lahan yang mereka miliki.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2015) dengan judul Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir untuk Memanfaatkan Mangrove sebagai alternatif Menghadapi Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa partisipasi untuk memanfaatkan mangrove sebagai bahan pangan masih kurang dan mangrove hanya dijadikan untuk budidaya ikan atau bahkan dikonversi

menjadi perumahan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan mangrove sebagai bahan pangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tajerin, dkk (2011) dengan judul Tingkat Kesejahteraan Dan Rumah Tangga Nelayan Miskin yang dianalisis menggunakan cara skoring dengan tiga kategori yaitu rendah, agak rendah dan sedang. menunjukkan bahwa keadaan kesejahteraan nelayan di kota lebih rendah dibanding dengan kesejahteraan nelayan di desa yang masuk kategori agak rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena pada masyarakat pesisir di pedesaan lebih memiliki modal sosial untuk menyelesaikan masalahnya.

Penelitian tersebut juga membahas keadaan ketahanan pangan tingkat rumah tangga pada masyarakat nelayan miskin yang dihitung menggunakan skor komposit dengan menggunakan indikator ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan. Dengan Hasil berikut, (1) Dari tingkat ketersediaan pangan baik masyarakat pesisir desa dan pesisir kota sebanyak 58,3 % masuk tingkat ketersediaan rendah. (2) Dari tingkat aksesibilitas, rata-rata memiliki akses yang rendah terhadap pangan. (3) Dari aspek Pemanfaatan pangan, memiliki skor yang rendah. Dengan demikian hampir seluruh masyarakat pesisir (59,7 %) keadaan ketahanan pangan nya agak rawan.

Akhmad Mun'im (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses dan Penyerapan Pangan terhadap Ketahanan Pangan,. Penelitian tersebut mengambil studi kasus di wilayah yang memiliki ketersediaan pangan surplus dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square Modeling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketahanan

pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan saja, suatu daerah yang memiliki surplus pangan tidak menjamin daerah tersebut tahan pangan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa faktor ketersediaan pangan tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan di wilayah yang memiliki ketersediaan pangan surplus, sedangkan faktor akses pangan dan pemanfaatan pangan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan dengan perhitungan setiap penambahan 100 % faktor akses pangan berdampak pada keadaan ketahanan pangan sekitar 50 %. Sedangkan untuk faktor akses pangan akan meningkatkan sekitar 31 %.

Penelitian Irawan (2010) yang berjudul Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan rumah tangga petani (Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulonprogo) menyatakan bahwa wilayah di kabupaten sleman memiliki 3 kondisi ketahanan pangan yaitu kondisi aman, kondisi rentan dan kondisi dipertanyakan yang dianalisis menggunakan metode sekuritisasi. Penyebab masih terjadinya keretakan pangan wilayah tersebut diantaranya karena faktor kemiskinan, jumlah anggota keluarga, harga sembako dan pendapatan petani.

3. Kerangka pemikiran

Menurut Nugroho dan Dahuri (1996) dalam bukunya yang berjudul Pembangunan wilayah : perspektif ekonomi sosial dan lingkungan menyebutkan bahwa kawasan pesisir mayoritas lahannya adalah berpasir, tanah berpasir tidak cocok untuk bercocok tanam selain itu pada kawasan pesisir pantai tidak hanya memiliki perbedaan kondisi geografis saja namun perbedaan karakteristik sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari wilayah lain.

Berdasarkan Penelitian yang telah di sebutkan pada Tinjauan pustaka, Nurjannah (2008) pada penelitian nya yang berjudul Sistem Ketahanan Pangan di Kawasan Pantai dan Pesisir menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pesisir masih sangat tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya kurang. Selain itu akses terhadap permodalan rendah serta petani tergantung pada kondisi alam.

Berdasarkan Teori dan Hasil penelitian diatas makan akan dilakukan penelitian di Kabupaten Bantul karena berdasarkan kondisi Topografi, Kabupaten Bantul memiliki daerah dataran rendah dan dataran tinggi, dimana daerah pesisir pantai berada di daerah selatan (Bappeda Bantul,2016). Dengan keadaan Geografi yang demikian, tentu bisa mempengaruhi situasi ketahanan pangan di suatu daerah.

Agar dapat mengetahui bagaimana situasi ketahanan pangan di wilayah pesisir Kabupaten Bantul maka dapat dilihat dari beberapa aspek, tidak hanya dilihat dari aspek ketersediaan pangan saja. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, disebutkan bahwa ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan, antara lain :

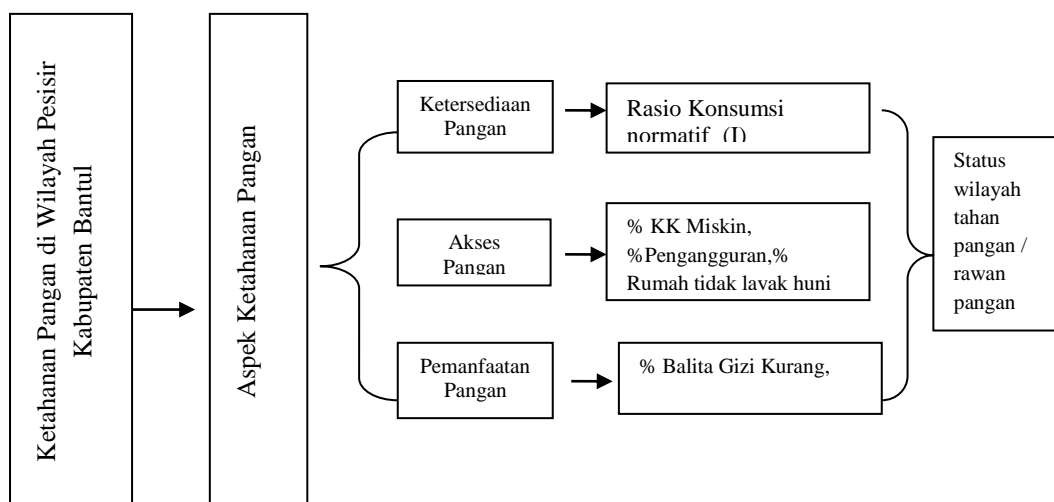
- 1) Ketersediaan pangan yang berbasis ketersediaan lokal secara optimal
- 2) Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat
- 3) Pemanfaatan Pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis situasi ketahanan pangan pada kawasan pesisir di Kabupaten Bantul menggunakan indikator ketersediaan

pangan, akses pangan serta pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator tersebut disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Aspek ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek yang paling utama dalam ketahanan pangan, dalam penelitian ini ketersediaan pangan dilihat dari indikator ketersediaan bahan pangan pokok yaitu padi, jagung dan umbi. Berdasarkan teori, mayoritas kawasan pesisir memiliki lahan berpasir yang kurang subur, oleh karena itu perlu diteliti berdasarkan aspek ketersediaan pangan bagaimana situasi ketahanan pangan di pesisir pantai Kabupaten Bantul.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pangan. Aspek akses pangan terbagi menjadi 2 yaitu aspek fisik dan ekonomi. Daerah yang memiliki akses pangan yang baik menyebabkan kebutuhan pangan rumah tangga tercukupi. Pada penelitian ini, pengukuran keadaan pangan berdasarkan akses pangan menggunakan beberapa indikator yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran serta jumlah rumah tidak layak huni. Berdasarkan Aspek Pemanfaatan pangan dapat dilihat dari jumlah balita Gizi Kurang



Gambar 1. Kerangka Pemikiran